



Tingkat Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa

Didik Iswahyudi¹⁾, Romadhon²⁾, Emanuel Budi Ege³⁾

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

didik@unikama.ac.id¹⁾

romadhon@unikama.ac.id²⁾

emanuelege76@gmail.com³⁾

Abstrak

Pemilihan Umum Raya (Pemira) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) merupakan cerminan nyata praktik demokrasi di lingkungan kampus, namun rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa menjadi tantangan yang terus berulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika partisipasi mahasiswa dalam Pemira BEM Unikama serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi sikap apatis mahasiswa, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemilu, minimnya sosialisasi dari pihak penyelenggara, dan lemahnya pendidikan politik di lingkungan perguruan tinggi. Melalui studi pustaka dan data wawancara dari berbagai periode Pemira BEM Unikama (2019–2024), ditemukan bahwa meskipun ada dinamika politik kampus yang cukup hidup pada masa-masa tertentu, partisipasi mahasiswa cenderung fluktuatif dan bahkan menurun drastis pada tahun-tahun tertentu, yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu secara aklamasi serta ketidaktahuan mahasiswa terhadap calon terpilih. Pendidikan politik dinilai sebagai elemen strategis untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara kampus yang demokratis, serta untuk membentuk karakter kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memperkuat budaya demokrasi melalui pendidikan politik yang terstruktur dan strategi pelaksanaan Pemira yang lebih inklusif, agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi, baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan berbangsa secara luas.

Kata Kunci: Mahasiswa, pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa, Partisipasi.

Abstract

The General Election (Pemira) of the Student Executive Board (BEM) at the University of PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) serves as a tangible reflection of democratic practice within the campus environment; however, the consistently low student participation remains a recurring challenge. This study aims to examine the dynamics of student participation in the BEM Pemira at Unikama and to explore the factors contributing to student apathy, such as limited understanding of the importance of elections, inadequate outreach by the organizers, and the weakness of political education in higher education institutions. Through literature review and interview data from various Pemira BEM periods (2019–2024), it was found that although campus political dynamics were active at certain times, student participation tended to fluctuate and even declined drastically in some years, as indicated by acclamation-based elections and students' lack of awareness regarding the elected candidates. Political education is seen as a strategic element to enhance students' awareness of their rights and responsibilities as democratic campus citizens, as well as to foster leadership character and social responsibility. This study highlights the crucial role of universities in strengthening a democratic culture through structured political education and more inclusive Pemira strategies, enabling students to actively participate in decision-making processes and contribute to democratic development, both within the campus and in the broader national context.

Keyword: Students, Student Executive Board Election, Participation.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Raya (Pemira) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di lingkungan kampus. Pemilu raya ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan hak pilihnya dan berkontribusi dalam menentukan pemimpin yang akan mewakili aspirasi mereka. Namun, rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pemilu raya BEM sering kali menjadi masalah yang kompleks. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran pemilu serta dampak kebijakan yang dihasilkan terhadap kehidupan sosial mahasiswa.

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik mahasiswa dan membentuk mereka menjadi individu yang bertanggung jawab secara etis dalam kegiatan politik (Prayugo & Prayitno 2022). Pendidikan politik adalah proses yang disengaja dan sistematis untuk membangun kepribadian politik individu, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan politik dengan penuh tanggung jawab moral. Hal ini menjadi krusial, karena melalui pendidikan politik, mahasiswa dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus terlibat secara aktif dalam menentukan arah kebijakan di lingkungan kampus.

Menurut (Fauziyah 2024) menegaskan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi dan politik tertentu. Dengan pendidikan politik, mahasiswa dapat memahami perannya sebagai warga negara dan berkontribusi secara aktif dalam kehidupan politik. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan mahasiswa, semakin tinggi pula tingkat kesadaran politiknya. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang politik, tetapi juga untuk mencegah generasi muda memiliki persepsi yang keliru terkait politik.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Menurut Amalia, (2024) terdapat tiga fungsi utama perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma tersebut. Pertama, perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Kedua, perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi. Ketiga, perguruan tinggi bertindak sebagai agen perubahan sosial di masyarakat.

Menurut, Amir, et al. (2023), Demokrasi mahasiswa merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan perguruan tinggi, di mana mahasiswa memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memilih pemimpin organisasi kemahasiswaan, serta menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka dengan penuh tanggung jawab. Sistem ini mencerminkan prinsip kebebasan, kesetaraan hak, serta keadilan dalam kehidupan akademik dan sosial di kampus. Sebagai wadah pembelajaran demokrasi, perguruan tinggi berperan dalam membentuk mahasiswa agar memiliki keterampilan kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Salah satu bentuk nyata dari demokrasi mahasiswa adalah Pemilihan raya BEM Unikama yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan pemimpin yang akan menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan mereka dalam kebijakan kampus.

Menurut Wibowo et al. (2020), partisipasi mahasiswa dalam dinamika demokrasi, baik di lingkungan kampus maupun dalam konteks politik yang lebih luas, mencerminkan tingkat kesadaran politik serta keterlibatan mereka dalam sistem demokrasi. Bentuk partisipasi ini dapat terlihat dalam berbagai aktivitas, seperti pemungutan suara dalam Pemilihan raya BEM di Unikama, keterlibatan dalam diskusi politik, aksi demonstrasi yang damai, serta keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada advokasi kebijakan dan perwakilan aspirasi mahasiswa. Keterlibatan semacam ini tidak hanya menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap hak dan tanggung jawab politik mereka, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang nyata di lingkungan akademik. Namun, partisipasi mahasiswa dalam pemilu kampus masih

menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian. Rendahnya tingkat keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi kampus sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya pemilu raya, minimnya sosialisasi dari pihak penyelenggara, serta munculnya sikap apatis terhadap proses politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran politik mahasiswa masih perlu diperkuat. Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi elemen, kunci dalam mendorong mahasiswa untuk memahami peran mereka sebagai pemilih yang bertanggung jawab, serta berkontribusi, secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip demokrasi.

Pada tahun 2019–2020, pemilu dilaksanakan secara langsung dengan prinsip LUBER JURDIL. Tiga pasangan calon bersaing dalam kontestasi yang cukup kompetitif, menunjukkan dinamika politik kampus yang aktif. Namun, meskipun secara teknis berjalan lancar, partisipasi mahasiswa tetap rendah. Minimnya keterlibatan mahasiswa disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik serta kurangnya pengalaman berorganisasi di kalangan mahasiswa non-ormawa. Periode 2021–2022 menunjukkan penurunan jumlah calon, dengan hanya satu pasangan yang lolos verifikasi, sehingga pemilu dilakukan secara aklamasi. Meski sebagian mahasiswa mengetahui adanya pemilu, tingkat partisipasi tetap belum memuaskan. Ketua BEM saat itu, Abi Naga Parawansa, mencatat bahwa hanya mahasiswa yang dekat dengan dunia organisasi yang benar-benar peduli terhadap pemilihan.

Kondisi serupa berlanjut pada tahun 2022–2023, di mana pasangan calon kembali terpilih secara aklamasi. Kegiatan pelantikan dihadiri lebih dari dua ratus orang, tetapi mayoritas hadir hanya sebagai formalitas. Banyak mahasiswa bahkan tidak mengenal pemimpin terpilih, yang menunjukkan bahwa partisipasi mereka tidak disertai kesadaran politik. Apatisme meningkat, dan berbagai program BEM tidak berjalan maksimal, menyebabkan kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga eksekutif kampus ini menurun. Tahun 2023–2024 pun tidak jauh berbeda. Ketua BEM saat itu, Mediarjo Sunjo, menjelaskan bahwa kesulitan memenuhi persyaratan pencalonan bukan karena beratnya syarat, melainkan karena kurangnya kesadaran dan minat mahasiswa untuk terlibat aktif dalam organisasi. Akibatnya, pemilu kembali digelar secara aklamasi. Mahasiswa lebih fokus pada aspek akademik dibandingkan kehidupan organisasi, sehingga istilah "kuliah pulang-kuliah pulang" menggambarkan pola pikir sebagian besar mahasiswa yang apatis terhadap politik kampus.

Secara kelembagaan, pelaksanaan pemilu diatur melalui UU-PMUK No. 01 dan 02 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa kedaulatan mahasiswa dijalankan melalui sistem demokrasi kampus. Pemilu BEM bertujuan memilih presiden mahasiswa setiap tahun, sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan dan penguatan lembaga mahasiswa. Menjelang Pemilu Raya 2025, sistem e-voting akan diterapkan dengan harapan meningkatkan partisipasi. Namun, tantangan tetap ada. Faktor seperti kurangnya pendidikan politik, dominasi orientasi akademik, hingga kekecewaan terhadap figur calon, menjadi penghambat utama keterlibatan mahasiswa.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen kampus dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan dan organisasi mahasiswa perlu dioptimalkan sebagai sarana pendidikan politik praktis. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi peserta pasif dalam sistem akademik, tetapi juga aktor aktif dalam kehidupan demokrasi kampus (Iskandar et al., 2024; Retada, 2024; Hastarini et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh, (Dyah Ayu Herlyne Luvitasari & Adi, 2013) yang berjudul “partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya jurusan tahun 2013 sebagai upaya pembentukan kehidupan demokratis di lingkungan PMPKN FIS UNESA” menjelaskan partisipasi politik yaitu ikut serta untuk secara aktif memilih pemimpin negara itu juga dilakukan dalam lingkungan kampus ketika diadakannya pemilihan PEMIRA HIMAPRO di jurusan PMP-KN pada tahun 2013 pada hal tersebut mahasiswa mempunyai sebuah tuntutan berperilaku aktif dan berpartisipasi dalam menyikapi sebuah kegiatan tersebut, dengan itu hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat menghasilkan kegiatan sosial politik yang sesuai dengan sistem pemerintahan organisasi mahasiswa. Dalam penelitian. (Studi et al. 2020), yang berjudul partisipasi politik mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam pemilihan

gubernur kalimantan barat” menjelaskan bahwa setiap kegiatan negara termasuk dalam pemilu warga negara berhak untuk mengikutinya dengan itu sudah membentuk dalam partisipasi politik, mahasiswa dalam berpartisipasi politik mengenai pemilihan gubernur Kalimantan Barat sebagian dari warga negara menjalaninya dengan kesadaran diri masing-masing dan terlihat aktif dalam kegiatan tersebut, dengan sepeerti itu menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga negara didalan sebuah negara yang demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Raya BEM Unikama tahun 2025 mengungkapkan beberapa alasan utama. Mereka mengaku kurang mendapatkan informasi terkait calon maupun program kerja yang ditawarkan, enggan mencari tahu lebih lanjut karena kesibukan akademik, serta tidak memiliki minat terhadap isu-isu politik kampus. Sikap apatis semakin menguat ketika mereka menganggap bahwa satu suara tidak berdampak besar dalam membawa perubahan, sehingga memilih untuk pasif. Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi politik turut memperburuk kondisi ini. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi membuat sebagian mahasiswa memandang pemilu sebagai sesuatu yang tidak relevan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik menjadi kebutuhan mendesak agar mahasiswa menyadari bahwa suara mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan kampus.

Menurut informasi, beberapa mahasiswa menunjukkan antusiasme untuk terlibat dalam proses demokrasi. Mereka menilai bahwa pemilu raya merupakan wadah pembelajaran politik sejak dini dan bentuk nyata partisipasi dalam menentukan pemimpin kampus yang memiliki visi progresif. Keterlibatan mereka didorong oleh harapan akan hadirnya pemimpin yang mampu memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan membawa inovasi bagi Unikama.

Hal ini, yang di sampaikan oleh Ketua KPU-PMUK menjelaskan bahwa Pemira 2025 semula direncanakan secara offline. Namun, demi menghindari antrean panjang dan potensi keributan, sistem e-voting akhirnya diterapkan. Dari 3.344 mahasiswa aktif, hanya 1.003 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hanya 536 mahasiswa (sekitar 16%) yang menggunakan hak pilihnya. Hasil pemungutan suara menunjukkan pasangan nomor urut 3 unggul dengan 295 suara (56%), disusul pasangan nomor 1 dengan 144 suara (27%), dan pasangan nomor 2 dengan 97 suara (18%).

Persepsi mahasiswa terhadap pemilu raya pun beragam. Sebagian menganggap pemilu penting untuk keberlangsungan demokrasi kampus, sementara sebagian lainnya merasa tidak mendapat keuntungan langsung dari hasil pemilu sehingga enggan berpartisipasi. Penelitian ini menjadi penting karena mampu menggambarkan secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam demokrasi kampus. Temuan ini dapat menjadi landasan dalam merancang strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih efektif, guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar politik dan partisipatif. Dalam jangka panjang, peningkatan partisipasi ini diharapkan mampu membentuk generasi mahasiswa yang peduli terhadap proses demokrasi baik di dalam maupun di luar kampus (Hidayanti & Siti, 2021).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini di pilih menggunakan Metode purposive sampling adalah pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu pada saat memilih informan sebagai subjek dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data memastikan memegang peranan penting dalam penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Secara konseptual, pengumpulan data merupakan proses yang sistematis dan terstandarisasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, proses analisis dilakukan dengan mengolah dan menyusun data untuk mengidentifikasi pola, menemukan hal-hal penting, serta menarik pelajaran yang relevan, peneliti mengikuti beberapa tahapan analisis data, dimulai dari pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi tematik, lalu dianalisis untuk

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Tahapan ini mencakup: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi sebagai dasar dalam menyusun hasil penelitian secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilu Raya BEM di Unikama

Pelaksanaan Pemilu Raya BEM tahun 2025 di Unikama, menunjukkan kemajuan berarti dari sisi inovasi teknis, khususnya dengan diterapkannya sistem e-voting untuk pertama kalinya. Terobosan ini menjadi langkah signifikan dalam memodernisasi tata kelola demokrasi kampus, sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital dalam organisasi mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pemilu mengikuti sembilan tahapan sistematis, mulai dari sosialisasi, pendaftaran calon, kampanye, debat kandidat, masa tenang, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil. Namun, kendala masih ditemukan, terutama dalam hal kestabilan sistem dan kesenjangan distribusi informasi, yang mengindikasikan bahwa kesiapan teknis belum sepenuhnya matang. Pemilu BEM tahun 2025 sudah memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pemilihan, namun masih membutuhkan pembenahan agar sistemnya stabil dan informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh mahasiswa.

Secara konseptual, pemilu di kampus bukan sekadar proses administratif, tetapi juga sebagai wahana pendidikan politik yang mendalam. Pemilu menjadi laboratorium demokrasi yang memungkinkan mahasiswa belajar memahami nilai-nilai partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemilu di Unikama telah memenuhi beberapa indikator demokrasi kampus sebagaimana dikemukakan oleh (Syakhila et al. 2023), seperti keterbukaan akses informasi, ruang dialektika melalui debat kandidat, serta transparansi dalam penghitungan suara yang dapat disaksikan secara terbuka. Hal ini memperlihatkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di ranah perguruan tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa mulai terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif di luar ruang kelas. Artinya, pemilu ini tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjadi bagian dari proses belajar berdemokrasi yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan kritis.

Namun demikian, penerapan e-voting juga menimbulkan sejumlah tantangan krusial. Dari sisi teknis, sistem sempat mengalami error saat proses pemungutan suara berlangsung, yang menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Selain itu, kurangnya pelatihan atau simulasi teknis membuat sebagian mahasiswa tidak memahami cara kerja sistem tersebut. Menurut (Nur Alifia & Sundawa 2023) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pemilu kampus sangat bergantung pada tingkat literasi digital mahasiswa. Ketika teknologi diperkenalkan tanpa disertai edukasi menyeluruh, justru akan memunculkan resistensi dan memicu penurunan partisipasi. Bahwa teknologi tidak akan efektif jika mahasiswa belum diberi pemahaman yang cukup mengenai cara penggunaannya, sehingga alih-alih mempermudah, justru dapat menjadi penghambat.

Kendala teknis ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur digital kampus. Menurut (Inayah Putri et al., 2023) keberhasilan digitalisasi dalam organisasi mahasiswa bukan hanya soal menyediakan platform teknologi, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia, pelatihan pengguna, dan sistem pendukung yang responsif. Oleh karena itu, pihak penyelenggara perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas server, pengujian sistem secara menyeluruh, serta pelatihan digital bagi mahasiswa dan KPU agar ke depannya pemilu daring dapat berjalan lebih optimal dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem teknologi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, termasuk pelatihan bagi mahasiswa agar mereka tidak mengalami kendala saat menggunakan platform e-voting.

Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan pemilu ini mendapatkan dukungan struktural dari Direktorat Kemahasiswaan, terutama dalam hal penyediaan anggaran, pengawasan umum, dan jaminan netralitas. Hal ini menunjukkan bahwa kampus memberi ruang otonomi kepada mahasiswa untuk mengelola proses demokrasi secara independen, tanpa intervensi yang dapat mencederai prinsip keadilan pemilu. Praktik ini sejalan dengan amanat UUD PMUK yang

mengatur tentang kemandirian organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan aktivitas politik kampus. Ini menjadi landasan penting bagi penguatan demokrasi kampus yang tidak hanya simbolik, tetapi juga substantif. Dengan adanya dukungan ini, mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi, tanpa tekanan dari pihak kampus, yang menjadikan prosesnya lebih kredibel dan adil.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, pelaksanaan Pemilu Raya BEM Unikama tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai langkah maju dalam demokratisasi kampus. Meski masih terdapat sejumlah kekurangan dalam hal teknis dan komunikasi publik, namun upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemilu yang lebih modern, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, meskipun belum sempurna, pelaksanaan pemilu ini patut diapresiasi karena menjadi tonggak penting dalam upaya membangun demokrasi yang sehat dan terbuka di lingkungan perguruan tinggi.

B. Tingkat Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilu BEM Unikama

Partisipasi mahasiswa dalam Pemilu Raya BEM Unikama tahun 2025 tergolong masih rendah. Dari 3.344 mahasiswa aktif, hanya 1.003 yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan hanya 536 yang benar-benar menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktual hanya sekitar 16%. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara jumlah mahasiswa yang memiliki hak pilih dengan mereka yang benar-benar menggunakan hak tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa proses demokrasi kampus belum sepenuhnya direspons secara antusias oleh seluruh mahasiswa, yang bisa mengindikasikan adanya persoalan masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun semua mahasiswa memiliki hak untuk memilih, hanya sebagian kecil yang benar-benar ikut memilih, yang mencerminkan bahwa antusiasme terhadap pemilu masih sangat terbatas.

Penyebab rendahnya partisipasi ini tidak sepenuhnya dapat disederhanakan sebagai bentuk apatisisme mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, beberapa faktor struktural dan teknis menjadi penyebab utama. Minimnya sosialisasi dari pihak penyelenggara, misalnya, menjadi persoalan mendasar yang menyebabkan sebagian mahasiswa tidak mengetahui waktu dan mekanisme pemilu. (Firmansyah 2020), menyatakan bahwa efektivitas komunikasi publik merupakan elemen kunci dalam membangun partisipasi politik. Tanpa informasi yang memadai, mahasiswa tidak memiliki motivasi ataupun kapasitas untuk berpartisipasi secara sadar dan aktif. Artinya, rendahnya jumlah pemilih bukan semata karena mahasiswa tidak peduli, melainkan karena informasi tentang pemilu tidak sampai secara jelas kepada mereka.

Menurut, (Hasna 2024) menegaskan bahwa efektivitas komunikasi politik dalam konteks pemilu kampus sangat dipengaruhi oleh bentuk dan jangkauan media yang digunakan. Informasi yang hanya disebar melalui media sosial tanpa adanya pendekatan langsung atau forum diskusi terbuka membuat mahasiswa yang tidak aktif di dunia digital menjadi terpinggirkan. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang digunakan KPU kampus belum bersifat inklusif dan partisipatif. Kita melihat bahwa tidak semua mahasiswa mengakses media sosial secara rutin, sehingga informasi penting tentang pemilu tidak menjangkau seluruh lapisan mahasiswa secara merata.

Aspek waktu juga menjadi determinan penting. Pemungutan suara yang dilakukan di tengah jadwal kuliah menjadikan banyak mahasiswa kesulitan untuk meluangkan waktu. Ini diperkuat oleh argumen (Irma & Fajriyah 2021), yang menyarankan agar desain waktu pelaksanaan pemilu kampus perlu diselaraskan dengan kalender akademik guna menghindari benturan kepentingan antara kegiatan akademik dan kegiatan politik mahasiswa. Kurangnya fleksibilitas waktu mengakibatkan banyak mahasiswa yang memilih untuk absen dari pemilu meskipun sebenarnya memiliki minat untuk berpartisipasi.

Meski demikian, dari sisi perkembangan kuantitatif dan kualitatif, pelaksanaan pemilu tahun 2025 sudah lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya yang hanya berlangsung secara aklamasi. Ketua KPU dan pihak Direktorat Kemahasiswaan melihat peningkatan ini sebagai

sinyal positif bahwa budaya demokrasi mulai terbentuk di kalangan mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Syauqii et al. 2024) yang menyebutkan bahwa demokrasi kampus adalah proses bertahap yang membutuhkan konsistensi, pembenahan berkelanjutan, dan evaluasi menyeluruh dalam setiap penyelenggaraannya. meskipun partisipasinya masih rendah, adanya pemilu yang benar-benar dilaksanakan menunjukkan bahwa proses menuju demokrasi yang lebih baik di kampus mulai berjalan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilu Raya

Analisis mendalam terhadap data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam Pemilu Raya BEM 2025: minimnya sosialisasi, hambatan teknis, waktu pelaksanaan yang tidak tepat, dan rendahnya kesadaran politik mahasiswa. keempat faktor ini saling berkaitan dan bersama-sama menjadi penghambat utama keterlibatan mahasiswa dalam pemilu kampus.

Kurangnya sosialisasi menjadi persoalan yang paling mencolok. Informasi pemilu yang tidak menjangkau seluruh fakultas dan program studi membuat banyak mahasiswa tidak mengetahui jadwal dan tata cara pemilihan. Tidak adanya pendekatan langsung melalui kelas atau kegiatan organisasi turut memperburuk situasi ini. Menurut (Dewi & Darmaastawan, 2024), menyatakan bahwa partisipasi mahasiswa sangat ditentukan oleh efektivitas dan jangkauan komunikasi penyelenggara. Ketika penyebaran informasi hanya bertumpu pada media sosial tanpa strategi komunikasi luring, maka penyebarannya menjadi tidak merata dan kurang berdampak. Artinya, jika informasi pemilu hanya diumumkan lewat media sosial tanpa penjelasan langsung, maka mahasiswa yang jarang membuka media sosial bisa jadi tidak mengetahui bahwa pemilu sedang berlangsung.

Faktor teknis berupa gangguan sistem e-voting juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi. Beberapa mahasiswa merasa tidak percaya terhadap keamanan dan stabilitas sistem, apalagi saat mereka menghadapi kesulitan teknis yang tidak segera direspons oleh penyelenggara. Menurut (Mubarak et al., 2022), menyampaikan bahwa keandalan sistem teknologi dalam pemilu sangat memengaruhi legitimasi hasil dan minat pemilih. Ketika teknologi gagal menjamin keadilan dan kenyamanan, maka partisipasi akan mengalami penurunan drastis. Bahwa gangguan teknis yang tidak segera ditangani bisa membuat mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap sistem, bahkan merasa malas untuk memilih karena prosesnya dianggap merepotkan atau tidak aman.

Waktu pelaksanaan juga menjadi hambatan penting. Pemilu yang dilakukan di tengah kesibukan akademik tanpa memberikan waktu khusus untuk pencoblosan membuat mahasiswa terpaksa memilih prioritas lain. Menurut (Anatasya et al., 2022), mengatakan bahwa, dalam risetnya menekankan pentingnya sinkronisasi antara agenda kampus dan kegiatan kemahasiswaan agar kegiatan politik kampus tidak terganggu oleh dinamika akademik. Tanpa perencanaan waktu yang strategis, pemilu akan terus bersaing dengan prioritas akademik mahasiswa.

Dengan demikian, jika jadwal pemilu bertabrakan dengan jam kuliah atau tugas penting, maka mahasiswa cenderung memilih aktivitas akademik dan mengabaikan kegiatan pemilihan.

Rendahnya kesadaran politik mahasiswa menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi dalam pemilu kampus. Banyak mahasiswa menganggap pemilu BEM tidak relevan dengan kehidupan mereka, bahkan belum memahami peran strategis BEM dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pendidikan politik di lingkungan kampus. (Rahmawati, 2022) menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai demokrasi perlu dimulai sejak dini melalui ruang-ruang kecil seperti organisasi mahasiswa agar kesadaran politik dapat tumbuh secara berkelanjutan. Tanpa pendidikan politik yang memadai, demokrasi kampus hanya akan berjalan secara prosedural tanpa keterlibatan yang bermakna. Akibatnya, mahasiswa cenderung mengabaikan pentingnya pemilu kampus dan memilih untuk tidak berpartisipasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemilu Raya BEM Unikama tahun 2025 telah berjalan sesuai prosedur demokrasi kampus dan menerapkan inovasi berupa e-voting. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan informasi kepada mahasiswa. Partisipasi mahasiswa tetap rendah, meskipun akses pemilu telah dibuka secara daring. Rendahnya kesadaran politik, hambatan teknis, serta ketidaksesuaian waktu dengan aktivitas akademik menjadi faktor utama penghambat partisipasi. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam sistem dan regulasi, peningkatan partisipasi mahasiswa masih menjadi tantangan. Perbaikan ke depan harus mencakup aspek teknis, sosialisasi, dan edukasi politik agar pemilu benar-benar mencerminkan demokrasi yang partisipatif dan bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Raya BEM di masa mendatang. Pertama, kepada KPU Mahasiswa selaku penyelenggara, perlu dilakukan optimalisasi strategi sosialisasi yang lebih masif dan menarik. Informasi terkait tahapan, waktu, dan mekanisme pemilu harus disampaikan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi, baik daring seperti media sosial dan platform akademik, maupun luring melalui seminar atau diskusi kampus. Kedua, pihak kampus diharapkan memberikan dukungan nyata, baik dalam bentuk fasilitas penunjang e-voting, pelatihan teknis bagi panitia, maupun regulasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu. Sinkronisasi jadwal pemilu dengan kalender akademik juga penting agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa. Ketiga, mahasiswa sebagai pemilih perlu menumbuhkan kesadaran bahwa partisipasi dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap dinamika kampus. Pemilu hendaknya dipahami bukan sekadar kegiatan formal, melainkan sebagai wadah pembelajaran politik dan kepedulian sosial. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal untuk mengkaji demokrasi kampus secara lebih mendalam. Pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan antar kampus dapat memperluas pemahaman, termasuk menggali dimensi sosial dan psikologis mahasiswa terkait sikap politik dan minat berorganisasi. Dengan perbaikan dalam aspek teknis, regulasi, dan literasi demokrasi, diharapkan Pemilu Raya BEM di Unikama ke depan dapat berjalan lebih inklusif, efektif, dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2024). Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4654–4663.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12886>
- Amir, A., Iskandar, A. M., & Salemuddin, M. R. (2023). MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERDEMOKRASI. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 209-216.
- Anatasya, E. P., Sayekti, A., & Author, C. (2022). *Kemahasiswaan Fem lpb (the Effect of Time Management Toward Student Activists Academic Achievement At Student Organization Fem lpb*. 19(02), 155–164.
- Arini Hidayanti, & Siti Nurhidayah. (2021). Pengaruh Political Trust Terhadap Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa Dengan Political Efficacy Sebagai Mediator. *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(1), 13–32.
<https://doi.org/10.36805/empowerment.v1i1.92>

- Dewi, N., & Darmaastawan, K. (2024). Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Tahun 2024. *Community ...*, 5(2), 2796–2800. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/26463%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/26463/18378>
- Fauziyah, N. (2024). Peran Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(10), 343–352. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i10.2489>
- Firmansyah, S. (2020). Analisis Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Bem Rema Ikip Pgri Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.31571/pkn.v4i2.2122>
- Hasna, N. N. (2024). Perspektif Mahasiswa Terkait Efektivitas Komunikasi Politik Melalui Media Sosial. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(10), 353–360. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i10.2490>
- Hastarini, R. A., Risma, P., Dwi, E., Prastiwi, Y., Nurul, A., Rahmat, P., & Abghia, N. (2025). *Branding Islam dalam Kampanye Politik 2024 : Dampaknya terhadap Preferensi Memilih Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Pendidikan Indonesia*. 4, 1–12.
- Inayah Putri, R. F., Luh Putu Risma Noviana, & I Putu Yoga Bawantara. (2023). Penerapan Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Uin Ar Raniry Banda Aceh. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, 13(2), 95–103. <https://doi.org/10.59819/jmti.v13i2.2998>
- Irma, & Fajriyah, N. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1), 111.
- Iskandar, I., Nasroen, J., Masruri, M., Feber, W., Syaini, S., Mulyadi, B. (2024). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 709-726.
- Making, E. K., Tuffahati, F., & Baihaqqi, R. F. (2023). Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar Pada Mahasiswa Yang Aktif Dalam Organisasi BEM FIS UNJ. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(3), 47-56.
- Mubarak, M. R., Rachmadi, A., Wijoyo, S. H., & Korespondensi, P. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Teknologi, Organisasi, Dan Manusia Terhadap Kesuksesan Penerapan E-Voting System (Studi Kasus Pemilihan Mahasiswa Raya Universitas Brawijaya) Analysis of the Impact of Technology, Organizational, and Human Factors on the Success o. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(5), 1–12. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202294610>
- Nur Alifia, S., & Sundawa, D. (2023). *Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa*. 8(1), 58–68. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>

- Rahayu, W. A. (2020). *Pemilihan Umum Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2019*.
- Rahmawati, A. (2022). Peranan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(6), 244–250.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1671>
- Retada, m. G. (2024). *Kewenangan bawaslu dalam mengawasi verifikasi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di indonesia* (doctoral dissertation, hukum pemerintahan).
- Riyanti, R., Hukum, F., Pahlawan, U., Tambusai, T., Luthfi, A., Pahlawan, U., Tambusai, T., Rohana, D., Hukum, F., & Krisnadwipayana, U. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–31.
- Studi, P., Fakultas, P., Pendidikan, I., & Tanjungpura, U. (2020). *Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 4, 47–58.
- Studi, P., Politik, I., Ilmu, F., Dan, S., Pemeritahan, I., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2024). *PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN (Studi Kasus: Mahasiswa Ilmu Politik Fisip UIN Ar- Raniry Angkatan 2019)*.
- Syakhila, H. D. S., Venesia Putri Oktavianingrum, & Rara An'nisaa. (2023). Demokrasi Yang Berkualitas: Peran Mahasiswa Dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Pemilu 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 55–61.
<https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.240>
- Syauqii, Z. A., Kafi, E. S., Mardiyah, I., Rahmadzikra, S. A., & Supriyono, S. (2024). Membangun Mahasiswa yang Memiliki Jiwa Demokratis dan Berpikir Kritis. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 219–224.
<https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1725>
- Wibowo, K. A., Rahmawan, D., & Syafaat, A. H. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152.
<https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>
- Yoriza, R., & Putra, E. . (2021). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih (Studi Kasus: Rendahnyapartisipasi Politik Mahasiswa UNP dalam PEMILU BEM UNP pada Tahun 2019). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4(1), 135–145.